



## **BAB III**

### **PENYAJIAN DATA**

#### **A. Deskripsi Subyek, Obyek dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Lokasi Penelitian, Obyek dan Informan**

Arti nama dari Bulusidokare adalah Pohon Cuncung Belut yang berbulu tumbuh sangat lebat dan melilit pada pepohonan yang pada waktu itu berupa hutan lebat dan belum ada penghuni. Sejarah singkat tentang Bulusidokare ialah Sebelum tahun 1878 Desa Bulusidokare masih berupa hutan Cuncung belut yang sangat lebat, Mbah Ndono atau disebut Mbah Wijaya Kusuma salah satu sesepuh memabat alas tersebut sehingga satu demi satu masyarakat menempati lingkungan tersebut, sehingga sesepuh tersebut yang sekarang masih ada petilasan berupa Krepyak yang konon pemakaman tersebut sangat sakral menurut cerita, apa saja yang lewat diatas pemakaman Mbah Wijaya Kusuma pasti jatuh. Sehingga sampai sekarang setiap Ruwah Desa atau bersih desa Kelurahan Bulusidokare mengadakan selamatan bersama dengan mengadakan hiburan Wayang Kulit sebagai tanda Chormat terhadap neneng Moyang kelurahan Bulusidokare sebagai cikal bakal berdirinya Kelurahan Bulusidokare dan Masyarakatnya Toto Tentrem gemah ripah Loh Jinawi makmur sentaosa.

Masyarakat Kelurahan Bulusidokare mayoritas penduduknya beragama Islam, sebelum berubah menjadi Kelurahan masyarakatnya



bermata pencaharian petani, namun mulai tahun 1980 berubah mejadi Industri dan perdagangan dan keadaan masyarakatnya sangat Plural dan bermacam- macam etnis. Mata pencaharian warga Bulusidokare sangat beragam dari pegawai negeri sipil, ABRI, swasta, wiraswasta pedagang, pertukangan dan jasa.

Tingkat pendidikan warga Bulusidokare sangat beragam, mulai dari lulusan TK, SLTP/SMP, SLTA/SMA, akademi /D1-D3, Sarjana (S1-S3), pondok pesantren, madrasah, pendidikan keagamaan, sekolah luar baisa dan pendidikan kursus atau keterampilan. Tetapi berdasarkan data monografi kelurahan Bulusidokare hingga Juni 2013, lulusan terbanyak yaitu SLTP/SMP yang berjumlah 1.733 orang.

Menurut sumber data statistik tahun Juni 2013 terdapat 2.257 kepala keluarga. Jumlah penduduk desa Bulusidokare berjumlah 9.028 orang yang terdiri dari 4.467 laki-laki dan 4.561 perempuan. Luas wilayah kelurahan Bulusidokare  $\pm$  144 HA (M2), dengan memiliki 8 RW dan 48 RT. Batas wilayah Desa Bulusidokare :

- a. Sblh Barat : Kel. Pekauman dan Kel. Sidokare Kec. Sidoarjo
- b. Sblh Timur : Desa Rangkah Kidul dan Kel Gebang Kec. Sidoarjo
- c. Sblh Utara : Kel. Pucang Anom dan Kel. Pekauman Kec. Sidoarjo
- d. Sblh Selatan : Kel. Sekardangan dan Kel. Celep Kec. Sidoarjo<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Data diperoleh dari data monografi desa Bulusidokare, pada tanggal 27 November 2013.



Obyek penelitian ini membahas tentang ilmu komunikasi pada komunikasi politik tentang proses sosialisasi pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2013. Kegiatan penelitian dilaksanakan di kelurahan Bulusidokare RW 01 Sidoarjo yang mengambil subyek penelitian yaitu warga yang berpartisipasi dalam pemilihan gubernut Jawa Timur 2013.

Sumber data berasal dari hasil wawancara dengan informan yakni dengan warga RW 01 Bulusidokare Sidoarjo. Berikut adalah nama informan yang telah diwawancarai:

Tabel informan 3.1

NO	Nama	Pekerjaan	Usia	Alamat
1.	Anggita Nevi A.	Mahasiswa	21 Tahun	Jl. Panglima Hidayat No 387 A.
2.	Umi Hanifah	Ibu Rumah Tangga	34 Tahun	Bulusidokare Gg. Jawa
3.	Syaiful Anwar	Guru SD	40 Tahun	Bulusidokare Gg. Jawa
4.	Agus Santoso	Karyawan Swasta	40 Tahun	Bulusidokare Gg. Jawa
5.	Abdullah	Karyawan Swasta	47 Tahun	Bulusidokare Gg. Jawa
6	Yuliana Doho	Ketua RT 02 RW 01	36 Tahun	Bulusidokare Gg. Jawa
7	M. Ridwan Hasyim	Ketua RT 06 RW 01	50 Tahun	Bulusidokare Gg. Flores No 38
8	Suwandi	Ketua RT 03	54 Tahun	Bulusidokare Gg. Bulus

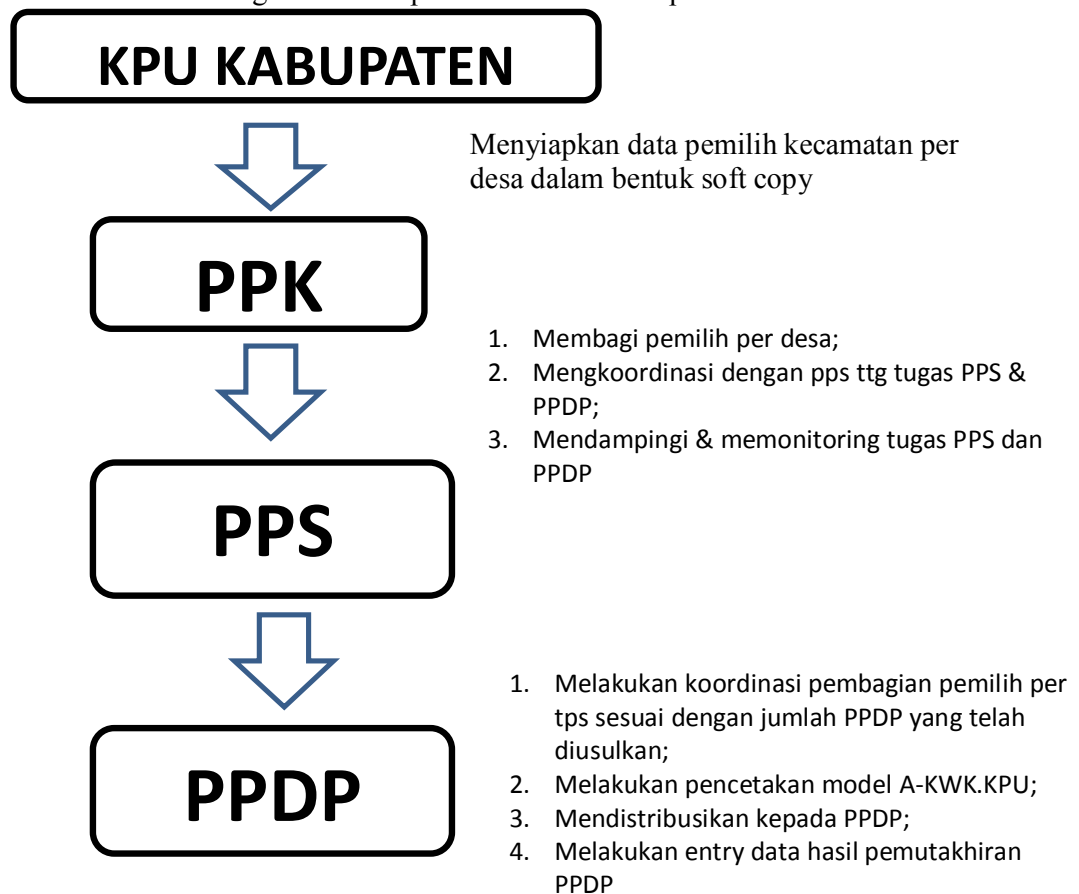
		RW 01		
--	--	-------	--	--

## 2. Pemilihan Gubernur Jatim 2013

### a. Alur Proses Pemutakhiran Pemilih Sampai Dengan Pengesahan Daftar

Pemilih Sementara (DPS) :

Bagan 3.1 Alur proses Pemutakhiran pemilih



### b. Detail kegiatan dalam program pemutakhiran daftar pemilih pemelukada prov. Jawa Timur 2013

Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP :



1. Distribusi data pemilih per desa se kecamatan oleh KPU kab ke PPS melalui PPK (26 mei 2013);
  2. Distribusi data pemilih oleh PPK kepada PPS dan pembagian pemilih per TPS oleh PPS dibantu PPDP (26-28 mei 2013);
  3. Pencetakan dan distribusi kepada PPDP oleh PPS (28-30 mei 2013);
  4. Pemutakhiran data pemilih di lapangan oleh PPDP (29 mei -7 juni 2013);
  5. Entry data dan pembuatan daftar pemilih sementara (DPS) oleh pps (8-10 juni 2013);
  6. Monitoring dari kpu kabupaten kepada PPS dan PPK (31 mei - 9 juni 2013).
- c. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pendaftaran pemilih
- 1) Pemilih dari wilayah bencana lumpur :
    - Wajib didata dimanapun pemilih tersebut tinggal;
    - Dimintakan copy identitas kependudukan dari pemilih tsb;
    - Dilampirkan dalam berkas model A-KWK.KPU;
    - Didistribusikan pemilih tersebut secara merata pada TPS di desa yang bersangkutan;
    - Kolom keterangan diisi “korban lumpur”;
  - 2) Pemilih di lapas dan rutan :
    - PPS dibantu PPK berkoordinasi dengan pimpinan lapas/rutan terhadap data penghuni sampai dengan hari H PEMILUKADA;



- Dimintakan copy identitas dari masing-masing pemilih untuk dilampirkan dalam model A-KWK.KPU;
- PPS melaporkan kepada kpu kabupaten melalui PPK data pemilih tersebut.<sup>55</sup>

### 3. Prosedur Penetapan Pemilih

Dari hasil pengambilan data dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) kelurahan Bulusidokare ada beberapa langkah yang dilakukan oleh PPS untuk menetapkan daftar pemilih tetap dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 kelurahan Bulusidokare yaitu:

1. Melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan:
2. Berdasarkan hasil pemutakhiran data/daftar pemilih, PPS menetapkan dan mengesahkan DPS menggunakan formulir Model A1-KWK.KPU yang ditanda tangani PPS dan dibubuhi cap PPS;
3. Mengumumkan DPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat untuk mendapatkan tanggapan masyarakat selama 21 (dua puluh satu) hari;
4. Melakukan perbaikan DPS apabila terdapat nama pemilih yang tidak tercantum dalam DPS, nama pemilih tersebut dimasukkan

---

<sup>55</sup> Data diporeleh dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) kelurahan Bulusidokare, 14 November 2014



dalam daftar pemilih tambahan dengan menggunakan formulir Model A3.2-KWK.KPU;

5. Melakukan pencatatan data pemilih tambahan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman DPS;
6. Memberikan diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dengan menggunakan formulir Model A3.3-KWK.KPU kepada Pemilih tambahan yang sudah terdaftar;
7. Dengan dibantu oleh PPDP mencatat data/nama pemilih (tambahan) ke dalam Daftar Pemilih Tambahan untuk setiap TPS dengan menggunakan formulir Model A2-KWK.KPU;
8. Menerima usulan perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya dari pemilih yang sudah terdaftar dalam DPS dan Pemilih Tambahan dengan menggunakan formulir Model A3.1-KWK.KPU.<sup>56</sup>

Warga RW 01 terbagi dalam 3 TPS yaitu TPS 1 dengan jumlah daftar pemilih 522 orang, TPS 2 dengan jumlah daftar pemilih 547 orang, dan TPS 3 dengan jumlah daftar pemilih 552 orang.

#### **4. Landasan Hukum Pemilu**

- a. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dg UU No 12 tahun 2008;

---

<sup>56</sup> Data diperoleh dari berita acara acara daftar pemilih tetap kelurahan Bulusidokare, pada tanggal 14 November 2013.S



- b. UU Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu;
- c. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik ;
- d. Peraturan pemerintah 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- e. Peraturan KPU Nomor 63 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan tata kerja KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS dalam pemilukada;
- f. Peraturan KPU NO 72 tahun 2009 tentang pedoman tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 15 tahun 2010;
- g. Peraturan bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012 dan Nomor 1 tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum;
- h. Keputusan KPU prov. Jawa Timur Nomor 16 /Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang pedoman teknis tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, KPU Kab/Kota dan KPU prov, serta penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan, dan pelantikan dalam pemilukada prov jawa timur tahun 2013.





- i. Surat edaran KPU Nomor: 282/KPU/VII/2012 perihal peraturan KPU No. 6 tahun 2011 dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada oleh PPS.<sup>57</sup>

## **5. Profil Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur di mata Warga Bulusidokare**

Ada pepatah yang mengatakan “tak kenal maka tak sayang”, hal ini tidak sesuai dengan praktek yang terjadi dilapangan ketika pemilihan umum terjadi. Banyak warga atau masyarakat yang tak mengenal secara jelas atau detail dengan para calon wakil yang rakyat yang akan dipilihnya.

Fakta yang terjadi, hal yang sering terjadi pada pemilihan umum yang dulu-dulu masyarakat datang ke TPS untuk memilih wakil rakyat namun mereka tidak tahu siapa yang harus mereka pilih. Mereka mengaku pilihan mereka berdasarkan saran dari anggota keluarga mereka.

Seperti halnya pengakuan dari Ibu Ifa yang tidak tahu secara detail tentang profil cagub dan cawagub provinsi Jawa Timur Tahun 2013, dia hanya tahu salah seorang calon karena pernah memimpin provinsi Jatim sebelumnya.<sup>58</sup> Bapak Abdullah mengakui hal yang sama, dengan berpendapat bahwa, “hanya mengetahui sedikit dan ada yang tidak mengetahui sama sekali. Pengetahuan tersebut didapat dari media televisi maupun koran”<sup>59</sup>

Pak Agus pun mengakui hal yang sama dengan Pak Abdullah bahwa ia, ”kurang jelas mengetahui profil cagub dan cawagub, hanya sedikit-

---

<sup>57</sup> Data diperoleh dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) kelurahan Bulusidokare, pada tanggal 14 November 2013.

<sup>58</sup> Data diolah dari hasil wawancara dengan Ibu Umi Hanifah, pada tanggal 7 Desember 2013.

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah, pada tanggal 9 Desember 2013.



sedikit sekali yang saya ketahui. Saya mengetahui informasi itu dari media massa dan media elektronik seperti koran dan televisi”.<sup>60</sup>

Sama halnya juga dengan Pak Syaiful yang juga kurang begitu mengikuti politik sehingga tidak begitu mengenal profil cagub dan cawagub, tetapi profil itu diketahui dari beberapa informasi dari teman dan juga karena saah satu calon pernah menjabat sebagai pemimpin.<sup>61</sup>

Tak jauh beda dengan para informan lain saudara anggita mengakui bahwa:

“Saya tidak mengetahui profil para calon secara jelas, tetapi pada saat hari berlangsung pemilihan sebelum masuk TPS saya membaca profil antara kandidat satu dua tiga, visi misi, partai politik yang mendukungnya ada kan profil itu ada di depan TPS. Dan mengetahui salah satu cagub dan cawagub dari media masa.”<sup>62</sup>

Mungkin faktor yang menjadi alasan para masyarakat tidak mengetahui profil calon wakil rakyat bisa jadi karena masyarakat tidak begitu mengikuti perkembangan politik yang terjadi secara mendalam dan intens, mereka hanya mengikuti secara sekilas dan sesaat agar mereka tahu saja.

Dalam kehidupan masyarakat kita, selalu ada perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dihindari, demikian juga dalam kehidupan politik. Tentunya setiap individu-individu memiliki cara pandang dan pola pikir yang berbeda dalam melihat politik yang terjadi di Indonesia ini.

Faktanya masih banyak masyarakat yang mengikuti pemilihan umum karena memilih merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan karena

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agus Santoso, Pada tanggal 8 Desember 2013.

<sup>61</sup> Data diolah dari hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Anwar, pada tanggal 9 Desember 2013.

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan saudara Anggita Nevi A, Pada tanggal 6 Desember 2013.



perintah dari pemimpin. Tanpa harus mengenal lebih jauh siapa yang benar-benar pantas untuk dipilih sebagai pemimpin yang amanah dan bijaksana. Atau masyarakat hanya sekedar ingin mengikuti pemilihan saja tanpa ada motif lain karena tidak mau melewatkan momen pemilihan umum yang sedang berlangsung, misal pemilih yang baru pertama kali mengikuti pemilihan umum.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Orang-Orang Yang Berperan Dalam Proses Sosialisasi Tentang Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2013**

Sebagaimana telah diungkapkan pada bab pendahuluan bahwa penelitian ini, salah satunya bermaksud untuk mengetahui siapa yang berperan dalam penyampaian informasi politik tentang pemilihan Gubernur Jatim tahun 2013 pada warga RW 01 Bulusidokare Sidoarjo.

Data penelitian yang di dapatkan dari hasil wawancara dari berbagai golongan warga menyatakan bahwa para perangkat desa seperti Ketua RT dan RW adalah komunikator dalam dalam penyampaian informasi politik tentang pilgub Jatim Tahun 2013.

Warga juga mengaku bahwa mereka juga mendapatkan informasi dari berbagai media massa, dari televisi, radio, dan juga surat kabar. Bahwa tanggal 29 Agustus 2013 diadakannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Jawa Timur.

Seperti yang dijelaskan oleh Anggita Nevi A. :

“Iya saya tahu waktu itu pemilihan Gubernur Jawa Timur, saya mendapatkan info dari pak RT yang mengirimkan selebaran kerumah saya, lalu saya disuruh datang untuk mencoblos melalui pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Dan sosialisasinya dengan adanya selebaran yang mengharuskan kita ke TPS untuk menggunakan hak suara kita pada pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2013”.<sup>63</sup>

Menurut pendapat bapak Syaiful tentang informasi dan sosialisasi pilgub bahwa:

“Saya mendapatkan info tentang pilgub dari selebaran, informasi dari media, bahkan dari lingkungan RT dan RW dari kelurahan setempat kami. Untuk sosialisasi pilgub dari perangkat desa, dengan diadakannya rapat RW untuk diumumkan bahwa tanggal 29 Agustus 2013 ada pilgub. Dan dikasih edaran bahwa nantinya akan diadakan pemilihan juga”.<sup>64</sup>

Bapak Agus berpendapat bahwa, ”pertama mendapatkan informasi dari perangkat desa, kedua dari informasi surat kabar, televisi dan lain sebagainya. Didesa saya kurang sosialisasinya soalnya hanya satu kali, itu hanya dilakukan satu minggu sebelum hari H”.<sup>65</sup> Kalau pendapat bapak Abdullah, “saya menngetahui dari pendaftaran di balai desa dan sosialisasinya cukup baik, untuk RT dan RW nya mensosialisasikan pada warganya bahwa pada tanggal 29 Agustus ada pilgub”.<sup>66</sup>

Sedangkan yang terakhir dari ibu Ifa mengaku bahwa, mendapatkan informasi tentang pilgub Jatim dari RT setempat yang menginformasikan

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Saudara Anggita Nevi A, pada tanggal 06 Desember 2013.

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Anwar, pada tanggal 09 Desember 2013.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agus Santoso, pada tanggal 08 Desember 2013.

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah, pada tanggal 09 Desember 2013.



pada warganya ketika ada kegiatan RT, misal acara tasyakuran malam 17 Agustus.<sup>67</sup>

Peran RT dan RW Bulusidokare Sidoarjo sangat kuat dalam pemberian informasi atau adanya sosialisasi pilgub Jatim tahun 2013 kepada warganya. Meskipun pemberian informasi itu hanya sekali saja, juga melalui selebaran yang menunjukkan bahwa akan diadakannya pilgub Jatim pada tanggal 29 Agustus 2013.

Di Wilayah RW 01 Bulusidoakare Sidoarjo media massa tidak berpengaruh kuat terhadap pemberian informasi mengenai pilgub Jatim tahun 2013, justru para penguasa seperti para parangkat desa lah yang memiliki pengaruh dan merekalah penerus informasi kepada warganya.

Pengaruh sosial lingkungan lebih berpengaruh pada warga RW 01 Bulusidokare tentang adanya pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2013. Pesan dari media tidak terjadi secara langsung dan segera, tetapi melalui perantara dan dipengaruhi oleh para pemimpin lingkungan setempat.

Pada suatu kegiatan selalu ada faktor-faktor yang mendukung dan menghambat jalannya suatu kegiatan tersebut. Begitu juga pada event pemilihan kepala daerah yang terjadi di RW 01 Bulusidokare Sidoarjo ini. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Yuli ketua RT 02 RW 01,

“Faktor penghambat dalam proses sosialisasi tentang pilgub Jatim tahun 2013 ini adalah mencari waktu yang tepat untuk memberitahukan pada warga bahwa adanya pilgub Jatim. Karena di bulan Agustus bertepatan dengan puasa ramadhan dan juga hari Raya

---

<sup>67</sup> Data diolah dari hasil wawancara Umi Hanifah, pada tanggal 07 Desember 2013.



Idul Fitri sehingga banyak warga yang mudik. Mau memberi informasi kepada ibu-ibu ketika arisan PKK itu ya tidak mungkin mbak, ibu-ibu kan jarang mengurus masalah politik. Yang sering membicarakan politik itu kan justru para bapak-bapak”, jeals ibu Yuli.<sup>68</sup>

Kalau menurut Bapak Suwandi Ketua RT 03 RW 01, mengatakan bahwa:

“Yang jadi kendala pada waktu proses sosialisasi pada warga itu ya masalah kesadaran politik atau kesadaran dalam berpartisipasi politik dalam diri warga masing-masing. Biasanya semakin aktif seseorang dalam kegiatan sosial politik maka semakin tinggi partisipasi politiknya dalam pilkada. Seperti kehadiran dalam rapat RT, keaktifan warga dalam kepanitian pemilihan. Kegiatan sehari-hari para warga juga menjadi kendala dalam proses sosialisasi, karena pekerjaan warga kan berbagai macam golongan”.<sup>69</sup>

Berbeda dengan ibu Yuli dan bapak Suwandi, menurut bapak Ridwan Selaku ketua RT 04 mengaku bahwa “tidak ada kesulitan dalam proses sosialisasi tentang pilgub Jatim karena warganya mudah diatur dan ada salah satu warga yang menjadi tim sukses pasangan Khofifah”.<sup>70</sup>

## **2. Bentuk Pesan Politik yang Disampaikan oleh Perangkat Desa**

Salah satu faktor pendukung dalam suatu pemilihan umum baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden adalah adanya permainan politik uang atau sering juga disebut bagi-bagi sembako gratis kepada warga sering kita jumpai di berbagai daerah. Hal ini dilakukan oleh tim sukses yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan massa yang banyak untu memilih calon dari partainya. Hal ini merupakan salah satu startegi penyampaian pesan dengan menggunakan pendekatan antarpribadi dengan menggunakan materi sebagai medianya.

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Ibu RT 02 RW 01 (Yuliana Dhoho), pada tanggal 01 Januari 2014.

<sup>69</sup> Hasil wawancara denga Pak RT 03 Rw 01 (Suwandi), pada tanggal 01 Januari 2014.

<sup>70</sup> Data diolah dari wawancara dengan Pak RT 04 RW 01 (M. Ridwan Hasyim), pada tanggal 01 Januari 2014.



Politik uang merupakan praktek politik yang fenomenal dan kontroversi. Karena strategi politik uang telah menjadi strategi ampuh yang digunakan untuk memperoleh dukungan massa. Di desa Bulusidokare Sidoarjo di salah satu RT di RW 01 diketahui bahwa adanya permainan politik uang untuk memenangkan salah satu calon gubernur. Hal ini diakui oleh Bapak Ridwan, yang mengatakan:

“Bahwa politik uang itu berguna sekali untuk memperoleh dukungan massa secara cepat dan banyak. Akan tetapi itu sudah menyalahi aturan dalam berpolitik. Politik uang dilakukan secara diam-diam oleh para tim sukses masing-masing calon. Dan tentunya mereka memberikan sesuatu bisa uang ataupun sembako kepada warga agar warga memilih calon gubernur sesuai instruksi dari masing-masing tim sukses”<sup>71</sup>

Walaupun mengetahui jika politik uang atau bagi-bagi sembako yang dilakukan oleh tim sukses itu menyalahi aturan kampanye pemilu. Pak Ridwan tetap membiarkan hal itu, menurutnya:

“Ya ngapain dilarang-larang mbak. Orang manapun kalau dikasih uang secara cuma-cuma atau dikasih sembako gratis pasti semua juga mau, meskipun nilai uangnya itu cuman sedikit. Kalaupun saya melarang para tim sukses pasti mereka tetap akan melakukan hal itu secara sembunyi-sembunyi, ya mending kayak gini mereka laporan dulu pada saya jadi saya bisa memantau keadaan yang terjadi. Tim sukses yang melakukan hal ini adalah pasangan dari Khofifah dan herman”.

Sebagian masyarakat sendiri, menganggap bahwa politik uang sendiri merupakan cara politik yang tidak demokratis yang bisa merusak citra perpolitikan di Indonesia. Akan tetapi sebagian masyarakat justru

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Pak RT 04 RW 01 (M. Ridwan Hasyim), pada tanggal 01 Januari 2014.

menganggap politik uang merupakan suatu kegiatan politik untuk melengkapi peperangan politik yang dilakukan berbagai kubu.

Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Ibu Yuli dan Pak Suwandi mengaku bahwa di lingkungan RT nya tidak ada yang namanya politik uang karena warga mereka tidak ada yang menjadi tim sukses salah satu calon. Ibu Yuli berpendapat bahwa:

“Di RT 02 ini pada pemilihan gubernur kemarin, tidak ada politik uang. Soalnya warga tidak ada yang menjadi tim sukses dan biasanya yang jadi tim sukses kalau ada pemilu itu ya suami saya sendiri mbak. Kebetulan kali ini tidak ada yang mengajak atau menawarkan pada suami saya untuk menjadi tim sukses. Jadi saya tahu benar kalau warga tidak ada yang menerima uang atau sembako dari tim sukses para calon”.<sup>72</sup>

Sedangkan bapak Suwandi menyatakan bahwa:

“Kegiatan politik uang itu kemungkinan terjadi karena peristiwa pemilu dilakukan secara serentak pada hari yang sama. Peristiwa politik uang biasanya terjadi pada waktu tenang sebelum pemilu. Pada waktu tersebut, itu merupakan kesempatan bagi para tim sukses dari masing-masing calon melakukan politik uang dengan cara membagi-bagikan sesuatu yang bisa menyenangkan orang, sehingga orang-orang akan mengikuti apa yang menjadi tujuan tim sukses tersebut”.<sup>73</sup>  
Operasi politik uang telah mendukung pada proses pemilihan

gubernur. Banyak hal yang menjadi kemudahan bagi masyarakat untuk

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Ibu RT 02 RW 01 (Yuliana Dhoho), pada tanggal 01 Januari 2014.

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Pak RT 03 RW 01 (Suwandi), pada tanggal 01 Januari 2014.





berpartisipasi dengan semangat dalam melakukan pemilihan. Akan tetapi masyarakat masih belum puas terhadap politik uang tersebut karena dinilai belum sepenuhnya memberikan informasi visi misi para kandidat calon gubernur. Dengan begitu Ibu Yuli menyampaikan pendapatnya pada para tim sukses agar lebih serius dalam menentukan strategi, karena politik uang sangat berguna untuk memperoleh kemenangan.

Pembagian uang yang jumlahnya tidak terlalu banyak tersebut, dikira sudah cukup untuk menarik massa. Dan orang-orang yang dapat uang tersebut sudah cukup senang karena uang yang didapatnya.

Politik uang dalam pemilihan umum itu adalah kegiatan yang direncanakan oleh tim sukses asing-masing calon untuk mempengaruhi dan menarik minat massa agar memilih calon yang telah dikehendaki oleh tim sukses dengan cara memberi uang ataupun sembako dengan jumlah nominal yang tidak tentu.

Pada pilgub jatim tahun 2013 lalu, ada beberapa orang tim sukses yang menggunakan strategi politik uang untuk menarik massa dengan cara membagikan uang kepada orang-orang tertentu.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Melalui pemilu dan hasilnya, masyarakat mengharapkan perubahan yang berarti untuk memperbaiki kehidupan mereka sehari-hari.



Maka dari itu pemerintah perlu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi atau mensukseskan acara pemilihan gubernur provinsi Jawa Timur tahun 2013. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu, pemerintah juga harus mampu memberikan pesan-pesan persuasif agar masyarakat mau berpartisipasi dalam pemilu.

Begitu juga para perangkat desa di Bulusidokare harus mampu memberikan pesan politik secara tepat dan persuasif agar para warga turut andil bagian dalam pemberian suara pada pilgub Jatim tahun 2013. Apalagi dengan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat desa, jadi pesannya harus benar-benar melekat dan mengena pada warga.

Walaupun setiap warga berbeda mengartikan pesan politik yang disampaikan oleh para perangkat desa, tetapi pada dasarnya inti pesan politiknya tetap sama yaitu mengajak warga untuk rame-rame menggunakan hak suara untuk mensukseskan pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2013.

Ibu Ifa berpendapat bahwa pesan politik yang diberikan perangkat desa ialah: “ayo rame-rame datang ke TPS untuk memilih gubernur dan wakilnya jangan menjadi golput karena akan dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab”.<sup>74</sup> Sedangkan menurut saudara Anggita pesan perangkat desa ya melalui selebaran yang dikirimkan kerumah-rumah

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Umi Hanifah, pada tanggal 7 Desember 2013.



warga, itu menunjukkan bahwa warga wajib mengikuti kegiatan yang diselenggarakan pemerintah.<sup>75</sup>

“Kita sebagai warga negara yang baik dan harus berpartisipasi dan ikut dalam pilgub. Jangan sampai kita tidak memilih atau golput”, hal ini yang disampaikan oleh pak Syaiful. Kalau menurut pendapat pak Agus pesan yang disampaikan perangkat desa adalah “agar masyarakat berpartisipasi untuk mensukseskan pilgug, agar terpilih calon pemimpin yang baik”<sup>76</sup>

Adanya pesan politik ini yang membuat para warga antusias untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar, agar terpilihnya pemimpin yang amanah, jujur, bijaksana, dan dapat mewujudkan cita-cita masyarakat dalam suasana yang aman, damai dan demokratis. Para perangkat desa tidak hanya memberikan informasi atau pesan melalui lisan saja. Tetapi juga melalui tulisan yang berupa surat edaran yang menginformasikan bahwa tanggal, hari, bulan dan juga nama yang tertera di surat edaran tersebut untuk mengikuti pemilihan gubernur provinsi Jawa Timur.

Dilihat dari hasil perhitungan surat suara pada saat pemilihan sudah berlangsung banyak warga yang datang untuk menggunakan hak suara, maka para perangkat desa telah sukses menyampaikan pesan atau informasi untuk mengajak para warga meramaikan pesta demokrasi provinsi Jawa

---

<sup>75</sup> Data diolah dari hasil wawancara dengan saudara Anggita Nevi A, pada tanggal 6 Desember 2013.

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agus Santoso, pada tanggal 8 Desember 2013.



Timur. Suksesnya pemilihan umum tak lepas dari peran warga dan para pemimpin untuk sama-sama melaksanakannya secara aman dan terkendali.

### **3. Partisipasi Warga pada Pemilihan Gubernur Jatim 2013**

Tanggal 29 Agustus 2013 warga Jawa Timur telah melaksanakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin yang mampu membuat provinsi Jawa Timur lebih baik diberbagai bidang. Tak terlepas juga warga Bulusidokare Sidoarjo juga ikut serta mensukseskan pesta demokrasi. Terbukti pada pemilihan gubernur tahun 2013 yang lalu, warga RW 01 Bulusidokare yang terdaftar di tiga TPS kelurahan Bulusidokare mampu menjalankan event 5 tahun sekali yakni pilgub dengan aman dan terkendali.

Partisipasi warga sangatlah penting dalam pemilihan umum baik untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara. Dari data yang diambil dari petugas PPS warga yang terdaftar dalam TPS 1 kelurahan Bulusidokare sebanyak 522 orang, dan warga yang menggunakan hak suaranya sebanyak 306 surat suara. Di TPS 2 kelurahan Bulusidokare sebanyak 547 orang. Jika dilihat dari Rekapitulasi hasil penghitungan suara, yang menggunakan hak suaranya sebanyak 359 surat suara. Dan di TPS 3 yang terdaftar sebagai pemilih adalah 552 orang, sedangkan yang memberikan hak suaranya 325 surat suara. Bisa dikatakan tingkat partisipasi warga yang terdaftar di TPS 2 lebih banyak dari pada TPS 1 dan TPS 3.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Data diolah dari hasil Panitia Pemungutan Suara (PPS), pada tanggal 25 November 2013.



Minimnya sosialisasi tentang pilgub Jatim di RW 01 dari perangkat desa ataupun PPS, tidak menjadi permasalahan yang fatal bagi warga. Karena warga tetap sadar bahwa hak suara mereka memberikan sumbangsi besar untuk kemajuan dan kemakmuran provinsi Jawa Timur dengan memilih pemimpin yang bijaksana.

Ketika peneliti melakukan wawancara kepada para informan, mereka rata-rata kurang mengetahui apa itu komunikasi politik. Tetapi mereka mengetahui apa itu partisipasi politik. Seperti pemaparan dari Seorang Guru SD yang bernama Bapak Syaiful berpendapat bahwa:

“Partisipasi politik adalah Kegiatan warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambil keputusan karena itu kita sebagai warga negara berhak untuk berpartisipasi politik. Sifat partisipasi politik itu adalah sukarela bukan dimobilisasi oleh suatu negara, dan itu hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam politik itu”.<sup>78</sup>

Saudara Anggita Nevi A. Seorang mahasiswa, dia menjelaskan bahwa “Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga yang tidak mengikuti partai politik”.<sup>79</sup>Berbeda dengan Anggita, Ibu Ifa seorang ibu rumah tangga mengartikan “partisipasi politik adalah peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintah, misal mengikuti kampanye politik, pemberian suara untuk pemilihan wakil rakyat”.<sup>80</sup>

Pak Agus Santoso seorang pegawai swasta menjelaskan “partisipasi politik adalah turut serta mensukseskan pemilu kepala daerah atau kepala pemerintah pusat bertujuan untuk memilih salah satu wakil atau calon

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Anwar, pada tanggal 09 Desember 2013.

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan saudara Anggita Nevi A., pada tanggal 06 Desember 2013.

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Umi Hanifah, pada tanggal 07 Desember 2013.



kepala negara”.<sup>81</sup> Kalau menurut pak Abdullah “Partisipasi politik ialah ikut serta mendukung kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah”.<sup>82</sup>

Rata-rata para warga mengartikan partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu bidang politik. Dari berbagai kalangan pekerjaan mereka lebih paham dengan apa itu partisipasi politik, meski dengan persepsi yang berbeda-beda tetapi tetap saja intinya berperan serta atau keikutsertaan dalam suatu hal politik. Ketika mereka ditanya apakah mengenal komunikasi politik mereka menjawab tidak tahu.

Para warga memiliki alasan-alasan tersendiri kenapa mereka mau berpartisipasi dalam pilgub Jatim tahun 2013. Berikut ini pemaparan para informan tentang alasan mereka turut mensukseskan pesta demokrasi Prov Jatim: “Karena kita memilih pemimpin Gubernur wilayah Jatim supaya ada perbaikan ekonomi dan kesejahteraan rakyat”, kata Pak Abdullah.<sup>83</sup>

Pak Saiful berpendapat bahwa, “iya saya mengikuti pilgub, karena saya ingin perubahan dalam pimpinan di daerah kami dan ingin untuk reformasi. Maka dari itu saya harus mengikuti dan memilih pilgub yang dilaksanakan oleh pemerintahan setempat”.<sup>84</sup>

Pak Agus memiliki alasan “Agar dapat dipilih pemimpin yang tegas, terpercaya, jujur, dan dapat merubah keadaan ekonomi rakyat”.<sup>85</sup>

Sedangkan Ibu Yuli mengatakan bahwa ”karena saya ingin menjadi warga

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agus Santoso, pada tanggal 08 Desember 2013.

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah, pada tanggal 09 Desember 2013.

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah, pada tanggal 09 Desember 2013.

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Anwar, pada tanggal 09 Desember 2013.

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agus Santoso, Pada tanggal 08 Desember 2013.



yang baik dengan mengikuti pilgub Jatim tahun 2013”.<sup>86</sup> “Karena saya ingin menggunakan hak pilih saya dan memilih pemimpin yang adil dan bijaksana”, alasan dari saudara Anggita.<sup>87</sup>

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilgub maupun dalam kehidupan dilingkungan berlangsung kondusif. Tingkat partisipasi yang tinggi dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam kehidupan sosial politiknya.

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yuliana Doho, pada tanggal 07 Desember 2013.

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan saudara Anggita Nevi A., pada tanggal 06 Desember 2013.